

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, POLITICAL CONNECTION, CAPITAL INTENSITY DAN INVENTORY INTENSITY TERHADAP TAX AGGRESSIVENESS

MUHAMMAD RINALDI^{1,2}
NOVITA WENINGTYAS RESPATI
FATIMAH
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

ABSTRACT

This study examines the influence of Corporate Social Responsibility (CSR), Political Connection, Capital Intensity, Inventory Intensity of Tax Aggressiveness. Samples were selected using a purposive sampling method so as many as 33 companies in the Basic Industry and Chemical sectors as population, which are listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2016-2018 period. The results of this study indicate that Capital Intensity positive affects on Tax Aggressiveness, which indicates that the higher the Capital Intensity, it is suspected that the company practices Tax Aggressiveness. The Corporate Social Responsibility and Political Connection variables show the resultys do not have a positive effect, which means that the higher the level of CSR disclosure and the companies that have Political Connection, the company allegedly did not practice Tax Aggressiveness. Inventory Intensity variable does not affect the Tax Aggressiveness which shows that the high or low value of Inventory Intensity does not affect the presence or absence of the company allededly practicing Tax Aggressiveness.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Political Connection, Capital Intensity, Inventory Intensity, Tax Aggressiveness*

¹ Correspondence Author

² email: mrinaldi858@gmail.com

Article Info:

Received 25 June 2020 | Revised 08 August 2020 | Accepted 07 October 2020

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Political Connection*, *Capital Intensity*, *Inventory Intensity* terhadap *Tax Aggresiveness*. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh sebanyak 33 perusahaan manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia sebagai populasi, yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Aggresiveness*, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi *Capital Intensity* maka semakin tinggi pula tingkat *Tax Aggresiveness*. Variabel *Corporate Social Responsibility* dan *Political Connection* menunjukkan hasil tidak berpengaruh positif, yang berarti bahwa tingginya tingkat pengungkapan CSR dan perusahaan yang memiliki *Political Connection* maka perusahaan diduga tidak melakukan praktek *Tax Aggresiveness*. Variabel *Inventory Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggresiveness* yang menunjukkan bahwa tinggi rendahnya nilai *Inventory Intensity* tidak berpengaruh terhadap ada tidaknya dugaan perusahaan melakukan praktek *Tax Aggresiveness*.

Kata-kata Kunci: *Corporate Social Responsibility, Political Connection, Capital Intensity, Inventory Intensity, Tax Aggresiveness*

1. PENDAHULUAN

Peran pajak bagi Indonesia sangatlah besar yang merupakan pendapatan negara terbesar dari pendapatan lainnya, yang menyumbang sebanyak 98,58% dari total pendapatan negara Indonesia (Kemenkeu, 2019). Besarnya penerimaan negara yang berasal dari pajak, tentunya membuat pemerintah akan menyusun sistem yang memberikan kemudahan untuk membayar pajak melalui kebijakan - kebijakannya. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia adalah adanya 3 (tiga) macam sistem (Mardiasmo, 2018). *Self assessment system* merupakan sistem yang memberi kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayarkannya sendiri, dan pemerintah hanya mengawasi (Mardiasmo, 2018). Pada sistem ini terjadi perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar namun wajib pajak mengaggap bahwa pajak merupakan beban yang mengurangi pendapat mereka.

Kementerian Keuangan mencatat bahwa penerimaan pajak pada tahun 2018 mencapai hanya 93% dari target 100% yaitu ada kekurangan sebesar Rp.99,3 triliun. Kekurangan penerimaan pajak dikarenakan adanya emiten – emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki tingkat kepatuhan pembayaran yang rendah. Kepatuhan pembayaran yang rendah ditimbulkan oleh praktek penghindaran pajak (CNN Indonesia, 2016). Kasus Penghindaran Pajak yang terjadi pada sektor manufaktur adalah yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Dirjen Pajak menganggap TMMIN telah melakukan penghindaran Pajak. Setelah dilakukan pemeriksaan pada pajak TMMIN, maka TMMIN diwajibkan menambah pembayaran pajak sebesar Rp.500 Miliar (Investigasi.tempo.co).

Tax Aggresiveness adalah penyesuaian penghasilan kena pajak melalui kelemahan undang – undang perpajakan (Chen, 2018). Pengukuran yang dipilih untuk menghitung *Tax Aggresiveness* adalah dengan *Effective Tax Rate* (ETR), ETR dipilih karena pengukuran dengan ETR memperhitungkan seluruh pajak yang dimiliki perusahaan, yaitu beban pajak kini dan tangguhan. Peluang untuk mengetahui indikasi perusahaan melakukan praktek *Tax Aggresiveness* pada perusahaan akan lebih besar apabila menggunakan ETR. ETR merupakan proksi negatif dengan tarif batas 0,25 atau 25% dimana jika ETR semakin rendah atau di bawah 25% maka diduga perusahaan melakukan praktek *Tax Aggresiveness* dan sebaliknya.

Corporate Social Responsibility merupakan sebuah informasi yang dirancang untuk mengungkapkan akuntabilitas sosial (Lako, 2015); Ronald et al (2019). Luasnya pengungkapan *Corporate Social Responsibility* tentunya mengeluarkan biaya yang besar karena menyangkut tentang biaya sumbangan dll. Selanjutnya biasa tersebut dapat menjadi pengurang pajak yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya. Atas dasar inilah mengapa *Corporate Social Responsibility* di pilih sebagai variabel yang dianggap mempengaruhi adanya praktek *Tax Aggresiveness*. Pada penelitian yang menggunakan variabel *Corporate Social Responsibility* oleh (Chen, 2018) menunjukkan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap *Tax Aggresiveness*. Hasil berbeda menurut penilitian (Mgbame, Mgbame, Yekini, & Yekini, 2017), (Tarigan, 2016) yang menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh secara negatif terhadap *Tax Aggresiveness*.

Political Connection merupakan hubungan yang dimiliki oleh petinggi perusahaan terhadap pemerintah (Wicaksono, 2017); Matangkin *et al* (2018); Ng & Phie (2020). Hubungan ini dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan untuk terhindar dari pemeriksaan pajak atas koreksi pajak dll, rendahnya resiko pemeriksaan ini membuat manajemen melakukan *Tax Aggresiveness*. Atas dasar inilah mengapa *Political Connection* di pilih sebagai variabel yang dianggap mempengaruhi adanya praktek *Tax Aggresiveness*. Pada penelitian yang menggunakan variabel *Political Connection* oleh (Wicaksono, 2017) dan (Zaitul & Ilona, 2019) yang menunjukkan hasil bahwa *Political Connection* berpengaruh terhadap *Tax Aggresiveness*. Penelitian (Chen, 2018) dan (Sadjiarto, Florencia, & Nevanda, 2019) menunjukkan hasil berbeda bahwa *Political Connection* tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggresiveness*.

Capital Intensity adalah sejumlah dana perusahaan yang di investasikan terhadap aset tetap (Muzzakki & Darsono, 2015). Perusahaan yang memiliki aset tetap yang besar menimbulkan beban penyusutan yang tinggi, beban ini dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk menjadi pengurang pajak. Atas dasar inilah mengapa *Capital Intensity* di pilih sebagai variabel yang dianggap mempengaruhi adanya praktek *Tax Aggresiveness*. Penelitian yang menggunakan variabel *Capital Intensity* oleh (Hidayat & Fitria, 2018) dan (Putri & Lautania, 2016) bahwa *Capital Intensity* berpengaruh secara positif terhadap *Tax Aggresiveness*. Hasil penelitian yang berbeda oleh (Indrani, 2018) yang menunjukkan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggresiveness*.

Inventory Intensity merupakan sejumlah dana perusahaan yang di investasikan terhadap persediaan (Hidayat & Fitria, 2018). Perusahaan yang memiliki persediaan besar menimbulkan beban pemeliharaan persediaan dan beban selisih dari perbedaan metode persediaan, sehingga beban ini dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan untuk menjadi pengurang pajak. Atas dasar inilah mengapa *Inventory Intensity* di pilih sebagai variabel yang dianggap mempengaruhi adanya praktek *Tax Aggresiveness*. Penelitian yang menggunakan variabel *Inventory Intensity* (Hidayat & Fitria, 2018), (Indrani, 2018), (Putri & Lautania, 2016) menunjukkan bahwa *Inventory Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggresiveness*. Terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dwiyanti & Jati, 2019) dan (Muzzakki & Darsono, 2015) bahwa *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Aggresiveness*.

Penelitian ini menggunakan variabel yang diduga mempengaruhi ada tidaknya praktek *Tax Aggresiveness* dalam sebuah perusahaan antara lain *Corporate Social Responsibility*, *Political Connection*, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity*. Alasan menggunakan variabel ini juga didasari karena masih terjadi ketidakkonsistenan hasil penelitian sehingga masih layak untuk dilakukan penelitian lagi. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Chen, 2018) yang menggunakan variabel *Corporate Social Responsibility* dan *Political Connection* sebagai variabel independen dan perbedaannya pada penelitian ini ditambahkan variabel *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* sebagai variabel independen. Variabel ini ditambahkan karena diduga bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi *Tax Aggresiveness* seperti aset tetap dan persediaan yang tinggi memunculkan biaya – biaya pengurang pajak. Alasan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur industri dasar dan kimia karena sektor ini merupakan sektor nomor 1 (satu) penyumbang pajak terbesar di Indonesia dan

selanjutnya pada sektor ini pula merupakan sektor yang memiliki aset tetap dan persediaan yang besar (Kompas,2019).

2. LANDASAN TEORI

Teori Agensi

Penelitian ini menggunakan teori agensi, yang dimana definisi dari teori agensi menurut (Jensen & Mecling, 1976) adalah “Hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu pihak (prinsipal) memberikan mandat kepada pihak lain (agen) untuk bertindak atas nama prinsipal dengan mendelegasikan seberapa otoritas pengambilan keputusan. Teori keagenan mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen adalah pihak yang dipekerjakan oleh pemegang saham untuk membuat keputusan yang terbaik untuk perusahaan dan wajib mempertanggungjawabkan semua keputusan yang diambil (Jensen & Mecling, 1976).

Teori agensi menjelaskan tentang hubungan antara manajemen dengan pemegang saham, hubungan tersebut dapat menimbulkan perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan masalah dalam hubungan keagenan. Masalah ini muncul disebabkan tindakan manajer yang tidak sesuai dengan keinginan para pemegang saham (Jensen & Mecling, 1976). Manajemen menginginkan laba yang tinggi karena manajemen menginginkan bonus yang tinggi, namun laba yang tinggi tentunya juga menimbulkan beban pajak perusahaan yang tinggi. Hal ini akan mengurangi bonus yang didapat oleh pihak manajemen, sehingga diduga manajemen melakukan praktek Tax Aggresiveness.

Fenomena dalam penelitian adalah tindakan Tax Aggresiveness yang dilakukan oleh manajemen perusahaan merupakan suatu keputusan yang diambil demi mementingkan kepentingan pribadi. Manajemen menginginkan laba yang tinggi untuk dapat mendapatkan bonus dari kenaikan laba perusahaan, namun dengan cara melakukan Tax Aggresiveness. Masalah yang timbul dari praktek Tax Aggresiveness adalah manajemen lebih banyak memiliki informasi mengenai praktek Tax Aggresiveness yang dilakukannya dibandingkan pihak prinsipal. Informasi ini diduga disembunyikan agar pihak manajemen mencapai tujuan atas kepentingan pribadinya. Perbedaan kepentingan inilah yang menjadi dasar terjadinya asimetri informasi antara manajemen (agen) dan pemilik (prinsipal) terhadap praktek Tax Aggresiveness.

Tax Aggresiveness

Tax Aggresiveness didefinisikan sebagai skema atau peraturan yang diterapkan dengan tujuan tunggal atau dominan yaitu untuk menghindari pajak yang sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku (Lanis & Richardson, 2012). *Tax Aggresiveness* merupakan aktivitas penanganan yang berbeda untuk menurunkan pendapatan kena pajak yang legal, dengan tujuan memaksimalkan pendapatan setelah semua penyelesaian perusahaan (Mgbame, Mgbame, Yekini, & Yekini, 2017). *Tax Aggresiveness* adalah serangkaian perencanaan pajak yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak namun masih sesuai dengan peraturan perpajakan, hal tersebut berbeda dengan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) (Wicaksono, 2017). Menurut definisi diatas bahwa *Tax Aggresiveness* adalah skema yang dilakukan untuk menurunkan beban pajak

yang berasal dari laba kena pajak menjadi lebih rendah, hal ini dilakukan agar pihak perusahaan mendapatkan keuntungan dari kegiatan ini.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Aggressiveness*

Pada saat ini kegiatan CSR adalah kesadaran dari perusahaan yang muncul dari akibat kerusakan alam yang mereka timbulkan, yang dapat merugikan masyarakat. Menurut (Lako, 2015, p. 96). Peraturan pajak mengenai CSR sebenarnya sudah ada sejak UU Pajak dikeluarkan yaitu UU No.7 Tahun 1983 yang mengalami perubahan terakhir menjadi UU No.36 Tahun 2008, yang mengatur tentang Biaya yang boleh menjadi pengurang beban pajak penghasilan yang diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 huruf i,j,k,l, dan m, Undang – undang ini menjelaskan bahwa berbagai macam sumbangan untuk mensejahterakan masyarakat seperti sumbangan penanggulangan bencana, pendidikan, olahraga, dan pembangunan infrastruktur umum. Berbagai macam peraturanpun dikeluarkan tentang biaya CSR yang dapat dijadikan pengurang beban pajak penghasilan yaitu PP No.93 Tahun 2010 tentang sumbangan yang dapat menjadi beban pengurang (*Deductible Expenses*). Pasal 3 di dalam PP No.93 Tahun 2010 memuat ketentuan bahwa biaya CSR hanya dapat dibebankan sebanyak 5% dari total sumbangan/biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan.

Perusahaan yang telah melaksanakan program CSR diungkapkan pada *annual report*, semakin banyak perusahaan melaksanakan program CSR, maka perusahaan semakin banyak pula pengungkapan CSRnya. Pelaksanaan program CSR yang banyak tersebut, tentu mengeluarkan biaya yang banyak pula, biaya ini dikeluarkan dalam bentuk sumbangan (Chen, 2018). Biaya yang besar tersebut menjadi pengurang laba sebelum pajak perusahaan, yang membuat laba menjadi rendah. Laba yang rendah ini tentunya diimbangi dengan beban pajak yang rendah pula, sehingga jika diukur dengan ETR maka tingkat ETR menjadi lebih rendah. ETR yang rendah mengindikasikan tingginya *Tax Aggressiveness* yang mengartikan bahwa perusahaan melakukan praktek *Tax Aggressiveness*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Chen, 2018) menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap *Tax Aggressiveness*, yang mengartikan bahwa semakin tinggi pengungkapan CSR maka semakin tinggi tingkat *Tax Aggressiveness*. Hasil berbeda menurut penelitian (Mgbame, Mgbame, Yekini, & Yekini, 2017), (Tarigan, 2016) yang menunjukkan bahwa CSR berpengaruh secara negatif terhadap *Tax Aggressiveness*, yang mengartikan bahwa semakin tinggi pengungkapan CSR, maka semakin rendah tingkat *Tax Aggressiveness*.

H₁: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap *Tax Aggressiveness*.

Pengaruh *Political Connection* Terhadap *Tax Aggressiveness*

Definisi dari *Political Connection* adalah Eksekutif perusahaan seperti Direktur, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit yang saat ini menjabat dan pernah menjabat di pemerintahan (Chen, 2018). Definisi lain dari *Politic Connection* adalah orang dari internal perusahaan yang menempati posisi strategis, menjadi tokoh politik yang terkemuka dalam pemerintahan (Wicaksono, 2017). *Political Connection* juga didefinisikan sebagai suatu hubungan khusus dengan pemerintah yang diharapkan mendapat perlakuan berbeda dari perusahaan lain (Sadjiarto, Florencia, & Nevanda, 2019). Disimpulkan bahwa

Political Connection adalah para eksekutif perusahaan memiliki hubungan kepada pemerintah, yang digunakan untuk mendapatkan perlakuan istimewa. Perlakuan yang berbeda dari perusahaan lain seperti mudahnya melakukan pinjaman di bank dan terhindar dari pemeriksaan pajak serta denda pajak.

Perusahaan cenderung memanfaatkan hubungan ini untuk kepentingan yang illegal seperti dapat terhindar dari pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan denda pajak. Rendahnya resiko mengindikasikan perusahaan berani melakukan penghindaran pajak secara *offensive*, yang membuat rendahnya beban pajak dan menimbulkan rendahnya ETR sehingga *Tax Aggressiveness* menjadi tinggi (Anggraeni, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh (Wicaksono, 2017) dan (Zaitul & Ilona, 2019) yang menunjukkan hasil bahwa *Political Connection* berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness*, yang mengartikan bahwa perusahaan yang memiliki *Political Connection* cenderung melakukan *Tax Aggressiveness*. Penelitian (Chen, 2018) dan (Sadjiarto, Florencia, & Nevanda, 2019) menunjukkan hasil berbeda bahwa *Political Connection* tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness*, yang mengartikan bahwa perusahaan yang memiliki *Political Connection* cenderung tidak melakukan *Tax Aggressiveness*.

H₂: *Political Connection* berpengaruh positif terhadap *Tax Aggressiveness*.

Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Aggressiveness*

Capital Intensity merupakan strategi yang dilakukan perusahaan dengan tujuan investasi dalam bentuk Aset tetap (Hidayat & Fitria, 2018). Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menghasilkan beban penyusutan, yang dimana beban tersebut dapat menjadi beban pengurang pajak penghasilan (*Deductible Expenses*). Peraturan mengenai beban penyusutan di atur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 huruf b dan Pasal 11 mengenai asas perhitungan tarif penyusutan serta Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-20/PJ/2014.

Aset tetap dengan nilai yang besar menghasilkan beban penyusutan yang tinggi, biaya penyusutan ini akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan (Muzzakki & Darsono, 2015). UU PPh Pasal 6 Ayat b mengategorikan bahwa biaya penyusutan dapat menjadi *Deductible Expenses* sehingga dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Laba yang rendah tentunya menimbulkan beban pajak yang rendah pula, sehingga tingkat ETR akan menjadi rendah yang mengindikasikan *Tax Aggressiveness* yang tinggi. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Hidayat & Fitria, 2018) dan (Putri & Lautania, 2016) bahwa *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness*, yang mengartikan bahwa besarnya Aset tetap menindikasikan *Tax Aggressiveness* yang tinggi. Hasil penelitian yang berbeda oleh (Indrani, 2018) yang menunjukkan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness*, yang mengartikan bahwa besarnya aset tetap menindikasikan perusahaan tidak melakukan *Tax Aggressiveness*.

H₃: *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Aggressiveness*.

Pengaruh *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Aggressiveness*

Inventory Intensity adalah strategi perusahaan dalam menginvestasikan dananya dalam bentuk persediaan (Hidayat & Fitria, 2018). Efektif dan efisiennya suatu perusahaan dalam mengatur persediaannya digambarkan dengan berapa kali perputaran persediaan itu dilakukan dalam satu periode tertentu (Putri & Lautania, 2016). Tingginya jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan akan berdampak pada munculnya beban pemeliharaan persediaan yang akan mengurangi laba perusahaan. Beban Pemeliharaan persediaan dapat menjadi

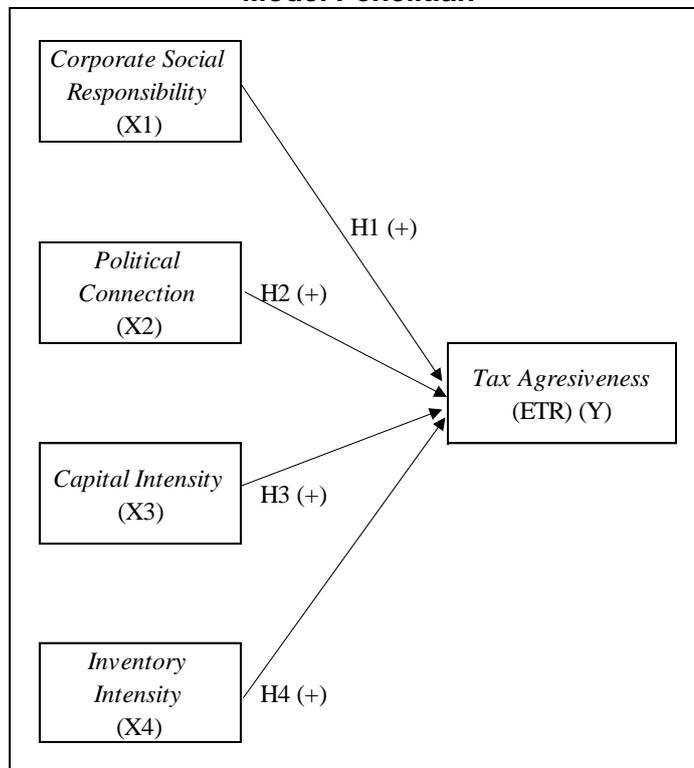
pengurang pajak penghasilan (*Deductible Expenses*) yang diatur dalam UU No.36 Tahun 2008 Pasal 6 dan persediaan yang jumlahnya kurang karena perbedaan metode diatur dalam pasal 10 Ayat 6, sehingga persediaan yang besar dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Semakin banyak nilai persediaan yang dimiliki perusahaan menimbulkan beban pemeliharaan persediaan yang tinggi, beban yang besar ini dapat mengurangi laba sebelum pajak perusahaan (Putri & Lautania, 2016). Rendahnya laba perusahaan tentunya akan menimbulkan beban pajak yang rendah pula, sehingga tingkat ETR akan menjadi rendah yang mengindikasikan *Tax Aggresiveness* yang tinggi. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian (Dwiyanti & Jati, 2019) dan (Muzzakki & Darsono, 2015) bahwa *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Aggresiveness*, yang mengartikan bahwa semakin tinggi persediaan maka semakin tinggi tingkat *Tax Aggresiveness*. Penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat & Fitria, 2018), (Indrani, 2018), (Putri & Lautania, 2016) menunjukkan bahwa *Inventory Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggresiveness*, yang mengartikan bahwa semakin tinggi persediaan maka semakin rendah tingkat *Tax Aggresiveness*.

H₄: *Inventory Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Aggresiveness*.

Berdasarkan teori dan pengembangan hipotesis yang telah di jelaskan maka perlu di buat sebuah model penelitian sebagai berikut:

Gambar 1
Model Penelitian



3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia/Industri Pengolahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 – 2018 yang berjumlah 73 Perusahaan. Teknik untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu membuat kriteria tertentu terhadap populasi agar sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan mengungkapkan *annual report* selama 3 tahun berturut-turut mulai dari 2016 – 2018 dan *annual report* dapat diakses dari situs BEI (www.idx.co.id) atau dari situs resmi perusahaan.
2. Perusahaan mengungkapkan aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam *annual report*.
3. Perusahaan yang tidak mengalami rugi selama 2016 – 2018.
4. Perusahaan yang menggunakan satuan nilai rupiah.

Setelah diterapkan kriteria terhadap populasi pada penelitian ini maka berikut adalah ringkasan dari jumlah – jumlah perusahaan yang tidak memenuhi kriteria di atas:

Tabel 1
Eliminasi Populasi

Keterangan	Total	Satuan
Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia	73	Perusahaan
Perusahaan yang tidak mengungkapkan <i>annual report</i> 2016 -2018	(6)	Perusahaan
Perusahaan yang tidak mengungkapkan Laporan CSR	-	Perusahaan
Perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun penelitian	(11)	Perusahaan
Perusahaan yang tidak menggunakan satuan rupiah	(23)	Perusahaan
Total perusahaan yang menjadi sampel	33	Perusahaan
Tahun yang digunakan sebagai objek penelitian	3	Tahun
Total data penelitian (33 Perusahaan x 3 Tahun)	99	Data

Jenis dan Unit Analisis

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih (Chandrarini, 2017). Penelitian ini menggunakan unit analisis *annual report* (laporan tahunan) yang didalamnya terdapat laporan keuangan, laporan CSR dan Struktur Organisasi Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar pada BEI periode 2016 – 2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder, data yang didapat dari studi pustaka dan sumber lain sebagai bahan referensi.

Definisi Operasional Variabel

Corporate Social Responsibility (CSR)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan mengukur jumlah pengungkapan CSR yang diungkapkan perusahaan. Pengungkapan CSR menggunakan indikator GRI *Standard* yang diperoleh dari website <http://www.globalreporting.org>. GRI *Standard* adalah sebuah pedoman untuk menyusun *sustainability reports* yang berjumlah sebanyak 136 pengungkapan yang meliputi *Environment (EN)*, *Human Right (HR)*, *Labor Practices (LP)*, *Product Responsibility (PR)*, dan *Society (SO)*.

Cara mengukur CSR pada penelitian ini adalah dengan memberikan nilai 1 jika perusahaan melakukan pengungkapan sesuai dengan check list pada GRI *Standard* dan diberikan nilai 0 jika tidak mengungkapkan. Checklist tersebut lalu di totalkan lalu dihitung dengan rumus berikut ini:

$$CSR_{li} = \frac{\sum xy_i}{n_1}$$

Keterangan:

$\sum xy_i$: Jumlah pengungkapan CSR yang ungkapkan perusahaan

n_1 : Jumlah total pengungkapan pada pedoman

Political Connection

Definisi dari *Political Connection* adalah Definisi dari *Political Connection* adalah Eksekutif perusahaan seperti Direktur, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit yang saat ini menjabat dan pernah menjabat di pemerintahan (Chen, 2018). Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh (Chen, 2018) yaitu memiliki 3 kategori yang dianggap memiliki *Political Connection*:

1. Perusahaan yang diteliti adalah BUMN dan BUMD yang terdaftar di BEI.
2. Direktur, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi dan Komite Audit di perusahaan merupakan politisi dari partai politik.
3. Direktur, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi dan Komite Audit di perusahaan merupakan pejabat dan mantan pejabat dari pemerintahan.

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan *variabel dummy* yaitu jika perusahaan memiliki salah satu dari tiga kategori tersebut maka dianggap memiliki *Political Connection* terhadap pemerintah, sehingga diberikan nilai 1, dan jika tidak memiliki *Political Connection* maka di berikan nilai 0 (Chen, 2018).

Capital Intensity

Pengukuran ini akan mengetahui seberapa besar proporsi Aset tetap dari total keseluruhan aset milik perusahaan. Hasil proposi nilai Aset tetap ini akan diketahui beban penyusutan yang ditimbulkan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan (Indrani, 2018). Meningkatnya Aset tetap di dalam perusahaan maka menimbulkan biaya penyusutan yang tinggi, sehingga mengurangi laba sebelum pajak. Pengukuran *Capital Intensity* yaitu dapat diukur dengan rumus sebagai berikut (Hidayat & Fitria, 2018):

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Inventory Intensity

Inventory Intensity adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan modalnya dalam bentuk persediaan (Hidayat & Fitria, 2018). Perusahaan yang memiliki persediaan besar menimbulkan biaya pemeliharaan persediaan tinggi yang dapat menurunkan jumlah laba sebelum pajak perusahaan. Rumus menghitung *Inventory Intensity*, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Inventory Intensity} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

Tax Aggressiveness

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Aggressiveness*. *Tax Aggressiveness* merupakan praktek penghindaran pajak secara *offensive* dengan tujuan meminimalkan beban pajak perusahaan (Chen, 2018). Pada penelitian ini pengukuran yang digunakan untuk menilai *Tax Aggressiveness* adalah *Effective Tax Rates* (ETR), ETR adalah proksi negatif, yaitu jika nilai ETR rendah maka tingkat *Tax Aggressiveness* tinggi dan sebaliknya. ETR dianggap mampu menggambarkan praktek *Tax Aggressiveness*, karena adanya beban pajak tangguhan yang berasal dari perhitungan beda temporer dan beda waktu (Hanlon & Heitzman, 2010). Rendah Semakin nilai ETR maka diduga perusahaan melakukan praktek *Tax Aggressiveness* (Chen, 2018). Pengukuran ETR dapat dilakukan dengan rumus berikut ini:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Total Income Tax Expenses}}{\text{Total Pretax Accounting Income}}$$

Keterangan:

Total Income Tax Expenses : Beban Pajak Penghasilan Badan

Total Pretax Accounting Income : Laba Sebelum Pajak

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda pada SPSS dengan model persamaan sebagai berikut:

$$\text{TAG (Y)} = \alpha + \beta_1\text{CSR}(X_1) + \beta_2\text{POLCON} (X_2) + \beta_3\text{CAPINT} (X_3) + \beta_4\text{INVINT} (X_4) + e$$

Keterangan:

TAG (Y) : *Tax Aggressiveness* dengan pengukuran ETR

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien regresi

CSR (X₁) : *Corporate Social Responsibility*

POLCON(X₂) : *Political Connection*

CAPINT (X₃) : *Capital Intensity*

INVINT (X₄) : *Inventory Intensity*

e : *Error* (kesalahan pengganggu)

Pengujian Asumsi

Pada penelitian ini variabel independen yang dilakukan uji asumsi adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Capital Intensity* (CAPINT), *Inventory Intensity* (INVINT) terhadap *Tax Aggressiveness* (TAG). Sedangkan variabel *Political Connection* (POLCON) tidak dilakukan uji asumsi dikarenakan variabel

tersebut tidak memiliki variasi data yaitu hanya memiliki nilai 1 dan 0 atau disebut juga variabel dummy (Ghozali, 2019, p. 180).

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Berikut adalah output SPSS uji normalitas dengan variabel *Unstandardized Residual*:

Tabel 2
Uji Normalitas

Variabel	Signifikasi	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,465	Berdistribusi Normal

Sumber: Data Diolah,2020

Hasil uji normalitas dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan variabel *Unstandardized Residual* yang telah di transformasi data dan di buang data outlernya menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,545 yang menunjukkan bahwa nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 ($0,545 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Berikut adalah tabel hasil rangkuman dari output SPSS untuk pengujian multikolonieritas adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
CSR (X1)	0,948	1,055	Tidak terjadi Multikolonieritas
CAPINT (X3)	0,749	1,335	Tidak terjadi Multikolonieritas
INVINT (X4)	0,720	1,389	Tidak terjadi Multikolonieritas

Sumber: Data Diolah,2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penelitian ini tidak terdapat gejala multikolonieritas, karena semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *Tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF tidak lebih dari 10.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dapat diketahui dengan menggunakan uji *Glesjer*. Jika profitabilitas signifikan masing – masing variabel independen $> 0,05$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi Heteroskedastisitas dalam model regresi (Ghozali, 2019, p. 142). Berikut adalah tabel hasil rangkuman dari output SPSS untuk pengujian Heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikasi	Keterangan
CSR (X1)	0,424	Tidak ada gejala heteroskedastisitas
CAPINT (X3)	0,883	Tidak ada gejala heteroskedastisitas
INVINT (X4)	0,491	Tidak ada gejala heteroskedastisitas

Sumber: Data Diolah,2020

Uji Auto Korelasi

Auto Korelasi dapat diketahui dengan melakukan Uji Durbin Watson. Nilai DW dikatakan bebas auto korelasi apabila nilai $dU < DW$ dan nilai $DW < 4 - dU$. Adapun nilai *Durbin - Watson* pada penelitian ini dapat dilihat pada ringkasan label berikut:

Tabel 5
Uji Heteroskedastisitas

dL	dU	DW	4-dU	Keterangan
1,4581	1,6830	2,086	2,317	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data Diolah,2020

Nilai dL dan dU didapatkan dari tabel *Durbin - Watson* dengan menggunakan nilai signifikasi 5% jumlah sampel 56 (n), dan jumlah variabel 3 (k=3). Berdasarkan tabel diatas, maka dapat ditentukan bahwa nilai *Durbin - Watson* dalam model regresi sebesar 2,086 terletak antara batas atas atau *upper bound* (dU) dan (4 - dU) yaitu $1,6830 < 2,086 < 2,317$, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Berdasarkan data hasil penelitian dan output program SPSS, maka selanjutnya akan dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 6
Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Rangkuman	Koefisien Regresi	t _{hitung}	Sig	Keterangan Hipotesis
Konstanta	0,472			
CSR (X1)	-0,176	-3,439	0,001	Ditolak
POLCON (X2)	-0,026	-2,486	0,016	Ditolak
CAPINT (X3)	0,157	3,879	0,000	Diterima
INVINT (X4)	0,028	0,650	0,519	Ditolak
t _{hitung}	= 2,00758		F _{hitung}	= 14,776
R	= 0,733		Sig F	= 0,000
R Square	= 0,537			
Adjusted R Square	= 0,500			

Sumber: Data Diolah,2020

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R dengan nilai sebesar 0,733 atau 73,3% adalah koefisien korelasi yang menunjukkan tingkat hubungan antara variabel independen terhadap penenden. Nilai korelasi tersebut menunjukkan tingkat hubungan yang tinggi karena berada di antara 0,600 sampai dengan 0,799 (berdasarkan tabel intrepretasi r). Nilai R Square dengan nilai 0,537 adalah R kuadrat, yang artinya variabel dalam penelitian ini menunjukkan variabel independen yang digunakan memiliki tingkat hubungan dengan variabel dependen sebesar 53,7%, sehingga selebihnya sebesar 46,3% adalah variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Nilai $Adjusted R$ Square dalam penelitian ini adalah sebesar 0,500 yang menunjukkan bahwa variasi atau naik turunnya variabel dependen (Y) dipengaruhi oleh variabel independen (X) sebesar 50%.

Uji Model (Uji F)

Berdasarkan tabel hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa pengaruh simultan dari variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Political Connction* (POLCON), *Capital Intensity* (CAPINT), *Inventory Intensity* (INVINT) terhadap *Tax Aggresiveness* (TAG) adalah berpengaruh. Hal ini terbukti dari nilai sig. 0,000 lebih kecil dari tarif signifikasi 0,05 dan nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} ($14,776 > 2,55$).

Uji Hipotesis (Uji t)

Hasil uji t telah di tuangkan dalam tabel uji regresi berganda yang digunakan untuk menjawab hipotesis didalam penelitian ini, penjelasan dari hasil uji regresi berganda adalah sebagai berikut

1. Hasil uji t antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) X1 terhadap *Tax Aggresiveness* (TAG) Y dimana nilai koefisien regresi sebesar -0,176 dan nilai t_{hitung} sebesar -3,439 dan tingkat signifikasinya 0,001. Hal tersebut menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) X1 tidak berpengaruh positif terhadap *Tax Aggresiveness* (TAG) Y, sehingga hipotesis pertama (H_1) adalah ditolak. Nilai minus (-) yang terdapat pada koefisien regresi menunjukkan pengaruh yang berlawanan arah, dimana setiap peningkatan yang terjadi pada *Corporate Social Responsibility* (CSR) akan berdampak terhadap penurunan *Tax Aggresiveness* (TAG), dan demikian sebaliknya.
2. Hasil uji t antara *Political Connction* (POLCON) X2 terhadap *Tax Aggresiveness* (TAG) Y dimana nilai koefisien regresi sebesar -0,026 dan nilai t_{hitung} sebesar -2,486 dan tingkat signifikasinya 0,016. Hal tersebut menunjukkan bahwa *Political Connction* (POLCON) X2 tidak berpengaruh positif terhadap *Tax Aggresiveness* (TAG) Y, sehingga hipotesis kedua (H_2) adalah ditolak. Nilai minus (-) yang terdapat pada koefisien regresi menunjukkan pengaruh yang berlawanan arah, dimana jika perusahaan memiliki *Political Connction* akan berdampak terhadap penurunan *Tax Aggresiveness* (TAG), dan demikian sebaliknya.
3. Hasil uji t antara *Capital Intensity* (CAPINT) X3 terhadap *Tax Aggresiveness* (TAG) Y dimana nilai koefisien regresi 0,157 dan nilai t_{hitung} sebesar 3,879 dan tingkat signifikasinya 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa *Capital Intensity* (CAPINT) X3 berpengaruh positif terhadap *Tax Aggresiveness* (TAG) Y, sehingga hipotesis ketiga (H_3) adalah diterima. Nilai positif (+) yang terdapat pada koefisien regresi menunjukkan pengaruh yang searah, dimana

setiap peningkatan yang terjadi pada *Capital Intensity* (CAPINT) akan berdampak terhadap kenaikan *Tax Aggresiveness* (TAG), dan demikian sebaliknya.

4. Hasil uji t antara *Inventory Intensity* (INVINT) X4 terhadap *Tax Aggresiveness* (TAG) Y dimana nilai koefisien regresi sebesar 0,028 t_{hitung} sebesar 0,650 dan tingkat signifikasinya 0,519. Hal tersebut menunjukkan bahwa *Inventory Intensity* (INVINT) X4 tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggresiveness* (TAG) Y, sehingga hipotesis keempat (H_4) adalah ditolak.

Pembahasan

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Aggresiveness*

Sampel penelitian menjelaskan bahwa perusahaan – perusahaan yang memiliki pengungkapan CSR yang luas ataupun tidak diterindikasi melakukan praktek *Tax Aggresiveness*. Hal ini berarti tidak ada motif dari perusahaan untuk melakukan praktek *Tax Aggresiveness* ketika banyak melaksanakan kegiatan CSR, yang artinya perusahaan juga selama ini beritikad baik dan ikut mendukung program pemerintah melalui UU No.40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial. Perusahaan yang memiliki pengungkapan CSR lebih banyak menjadi lebih bertanggung jawab dalam membayar pajaknya tanpa dengan sengaja melakukan penghindaran pajak secara massif (*Tax Aggresiveness*). Perusahaan sadar jika telah banyak mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan untuk apa tidak banyak membayar pajak, karena pajak juga digunakan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan yang searah dengan tujuan perusahaan melakukan CSR.

Perusahaan yang melaksanakan CSR dengan biaya yang besar dan rutin tentunya akan memiliki pengungkapan yang lebih luas, dikarenakan banyaknya hasil yang dicapai dalam mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan. Biaya yang dikeluarkan perusahaan memang benar – benar digunakan untuk melaksanakan CSR tanpa ada motif untuk menggunakan biaya tersebut menjadi pengurang beban pajak, perusahaan beranggapan dengan melaksanakan CSR maka reputasi perusahaan terhadap masyarakat semakin tinggi. Reputasi sangat penting bagi perusahaan dikarenakan ini adalah keuntungan dari segi non keuangan yang tentu akan meningkatkan laba karena perusahaan telah banyak dikenal oleh masyarakat luas. Peningkatan laba bisa berasal dari banyaknya produk yang terjual dan kemudahan untuk melakukan ekspansi dikarenakan reputasi yang baik tadi terhadap perusahaan tersebut.

Pengaruh *Political Connection* terhadap *Tax Aggresiveness*

Sampel penelitian menjelaskan bahwa perusahaan – perusahaan yang tidak memiliki ataupun memiliki *Political Connection* diduga melakukan atau tidak melakukan praktek *Tax Aggresiveness*. Hal disebabkan yang memiliki *Political Connection* ada yang melakukan penghindaran pajak secara sewajarnya atau secara massive. Perusahaan yang tidak memiliki *Political Connection* juga ada yang melakukan penghindaran pajak secara wajar dan secara massive. Perusahaan yang memiliki *Political Connection* terbukti tidak menggunakan koneksi tersebut untuk hal – hal yang merugikan negara dan untuk kepentingan pribadi saja, namun lebih pada menjadi acuan bagi perusahaan yang tidak memiliki *Political Connection* untuk lebih banyak membayar pajak daripada daripada melakukan penghindaran pajak.

Pada penelitian ini menghasilkan pandangan baru bahwa perusahaan yang memiliki Political Connection cenderung lebih patuh dalam membayar pajak daripada perusahaan yang tidak memiliki Political Connection. Perusahaan beranggapan bahwa ketika memiliki Political Connection cenderung lebih menjadi beban berat bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang offensive (Tax Aggressiveness) dikarenakan adanya rasa "malu" terhadap masyarakat. Perusahaan yang memiliki Political Connection dianggap sebagai pelopor oleh perusahaan lain untuk patuh terhadap membayar pajak, sehingga jika perusahaan terbukti melakukan praktek yang merugikan negara atau kecurangan tentunya bukan hanya nama perusahaan tersebut yang tercoreng namun pemerintahan di negara itu pun ikut tercoreng.

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Aggressiveness*

Pada dasarnya, perusahaan yang memiliki nilai *Capital Intensity* yang tinggi memiliki aset tetap yang tinggi dan memiliki biaya penyusutan yang tinggi. Sebaliknya dengan perusahaan yang memiliki aset tetap yang kecil maka biaya penyusutan yang di timbulkan akan sangat kecil, sehingga beban pajak penghasilan menjadi tinggi. Biaya penyusutan yang tinggi dimanfaatkan secara berlebihan oleh perusahaan untuk dapat mengurangi tingkat beban pajak perusahaan, sehingga perusahaan memiliki laba yang tinggi. Motif ini sengaja dilakukan perusahaan karena biaya penyusutan menurut peraturan perundang – undangan dalam perpajakan dapat menjadi pengurang pajak penghasilan perusahaan, dengan memanfaatkan undang – undang perpajakan ini maka perusahaan mendapatkan celah untuk melakukan praktek *Tax Aggressiveness*.

Penurunan pajak penghasilan ketinggian yang lebih rendah terbukti dilakukan oleh perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi, kemungkinan perusahaan dengan sengaja menginvestasikan banyak dananya untuk memperbanyak aset tetap agar dapat menekan tingkat beban pajak penghasilan perusahaan. Aset tetap yang banyak dimiliki perusahaan dapat di tingkatkan lagi beban penyusutan dengan cara mengubah metode penyusutan misalnya dari garis lurus menjadi saldo menurun guna memperoleh beban pajak yang sangat rendah. Beban pajak yang rendah tentunya akan meningkatkan laba perusahaan yang akan mensejahterakan para pemegang saham, namun di sisi lain negara akan di rugikan akibat kurangnya pajak yang diterima akibat perusahaan yang melakukan *Tax Aggressiveness*.

Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Aggressiveness*

Pada dasarnya perusahaan yang memiliki nilai *Inventory Intensity* yang tinggi memiliki persediaan yang tinggi akan mengeluarkan biaya pemeliharaan dan biaya perbedaan metode yang tinggi dan sebaliknya. Pada penelitian ini tidak berlaku sebagaimana demikian, bahwa perusahaan yang memiliki persediaan yang besar cenderung memiliki beban pajak yang tinggi dan terindikasi minim melakukan Tindakan *Tax Aggressiveness*. Semestinya sesuai peraturan perpajakan bahwa beban pemeliharaan persediaan dan biaya perbedaan metode persediaan menjadi dapat menjadi pengurang beban pajak, namun pada penelitian ini tidak terjadi demikian. Bahkan perusahaan yang memiliki persediaan kecil dan tentu mengeluarkan beban pemeliharaan dan biaya perbedaan metode persediaan sedikit memiliki tingkat *Tax Aggressiveness* yang tinggi.

Penurunan pajak penghasilan keningkat yang lebih rendah tidak terbukti dilakukan oleh perusahaan yang memiliki persediaan yang tinggi, bisa jadi perusahaan yang lebih besar lebih mengutamakan pembayaran pajak dikarenakan kesadaran pihak perusahaan untuk berkontribusi terhadap negara. Biaya pemeliharaan persediaan ini bisa saja tidak diinginkan perusahaan untuk dimunculkan karena menyangkut dengan kualitas barang persediaan. Barang persediaan yang telah lama tersimpan digudang tentunya akan mengurangi kualitas dan membuat kegiatan operasional perusahaan tidak optimal, karena lebih banyak mengeluarkan dana untuk biaya pemeliharaan persediaan. Perusahaan tentu akan lebih banyak mengoptimalkan persediaannya untuk bisa terjual agar mendapat laba daripada sengaja ditumpuk demi menimbulkan biaya pemeliharaan persediaan agar dapat mengurangi beban pajak.

Biaya yang muncul dari perbedaan metode persediaan antara laporan keuangan komersial dengan fiskal tidak dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan praktek *Tax Aggressiveness*, namun perusahaan menggunakan biaya tersebut sewajarnya. Biaya perbedaan metode persediaan ini tidak akan muncul apabila perusahaan menggunakan metode yang sama antara laporan keuangan komersial dengan fiskal sehingga membuat tidak adanya pengurang pajak yang muncul dari perbedaan metode persediaan ini. Selanjutnya biaya – biaya yang memang muncul dari besarnya persediaan dimanfaatkan sewajarnya oleh perusahaan tanpa digunakan untuk dicadangkan sebagai beban pengurang pajak, yang didalam peraturan perpajakan bahwa cadangan tersebut tidak diperbolehkan menjadi pengurang beban pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian empiris menunjukkan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh positif terhadap *Tax Aggressiveness*. *Political Connection* tidak berpengaruh positif terhadap *Tax Aggressiveness*. *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Aggressiveness*. *Inventory Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness*. Penelitian ini mendukung teori agensi bahwa adanya praktek *Tax Aggressiveness* dikarenakan motif dari manajemen perusahaan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui bonus yang tinggi apabila laba yang diperoleh tinggi.

Implikasi praktis pada penelitian ini Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) dapat mempertimbangkan untuk merevisi atau mengeluarkan aturan baru untuk menangkal tentang peraturan dijadikan celah bagi perusahaan untuk melakukan *Tax Aggressiveness* dikarenakan bahwa adanya total aset yang tinggi ditujukan untuk mengurangi beban pajak melalui beban penyusutan. Ditjen pajak juga dapat meningkatkan sanksi bagi perusahaan yang terbukti melakukan praktek *Tax Aggressiveness* agar adanya efek ketakutan bagi perusahaan yang dengan sengaja berani melakukan praktek *Tax Aggressiveness*. Bagi Prinsipal hasil penelitian ini memberikan informasi untuk para prinsipal untuk dapat mengetahui perusahaan yang terindikasi melakukan *Tax Aggressiveness* dan akibat dari melakukan praktek tersebut. Prinsipal dapat memperkuat tata kelola dan satuan pengawasan internal (SPI) didalam perusahaan agar peluang manajemen melakukan praktek *Tax Aggressiveness* menjadi kecil. SPI yang kuat dapat selalu meriviu setiap Tindakan yang dilakukan oleh manajemen, sehingga motif manajemen untuk memperoleh bonus pribadinya dapat di minimalisir.

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan variabel CSR yang pada saat ini laporan CSR sudah berevolusi menjadi lebih detail dan lengkap yaitu *Sustainability Reporting*. Alasan penelitian ini menggunakan CSR dikarenakan pada saat ini perusahaan yang menerbitkan *Sustainability Reporting* masih sangat sedikit, sehingga jika digunakan pada penelitian saat ini maka sampel yang digunakan akan sangat sedikit. Kemungkinan yang terjadi apabila menggunakan pengungkapan *Sustainability Reporting* maka kemungkinan hasil penelitian menjadi berbeda dikarenakan ada banyak item pengungkapan yang ada yang berarti banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selain itu keterbatasan pada penelitian ini menghasilkan nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,500 atau 50% yang menunjukkan bahwa variasi atas naik turunnya variabel dependen (Y) dipengaruhi oleh variabel independen (X) sebesar 50% sedangkan sisanya 50%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, M. R., & Fadjar, A. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Widyatama*, 862 - 871.
- Anggraeni, R. (2018). Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Tax Aggressiveness (Studi Empiris: Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). *Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang*.
- Anthony, R., & Govindarajan, V. (1998). *Management Control System. Ninth Edition*. Boston: Mc Grow-Hill Co.
- Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2010). *Financial Management: Theory and Practice, 13th edition*. USA: Cengage Learning.
- Chandrarin, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekata Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chen, X. (2018). Corporate social responsibility disclosure, political connection and tax aggressiveness: evidence from china's capital markets. *Open Journal of Business and Management*, 6, 151-164.
- Darussalam, & Septiyadi, D. (2007). *Tax Planning, Aggressive Tax Planning, Tax Avoidance, Tax Evasion dan ANti Tax Avoidance, Edisi Perdana September*. Jakarta: Inside Tax.
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & P., S. A. (1995). Detecting Earning Management. *The Accounting Review Vol. 70 No.2 April*, 193-225.
- Dwiyanti, I. A., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 27.3 Juni ISSN: 2302-8556*, 2293 - 2321.
- Ghozali, I. (2019). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 1 - 138.

- Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Eksis: Volume 13 No. 2*, 157 - 168.
- Indrani, D. (2018). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI Tahun 2012 - 2016). *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia Vol.1, No.1, Januari 2018*, 147 - 167.
- Jensen, M., & Mecling. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal Of Financial Economic*, 305-360.
- Lako, A. (2015). *Berkah CSR Bukan Fiksi*. Jakarta: La Tofi Enterprise Media.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: a test of Legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 26 Issue: 1*, 75-100.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan, Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mgbame, C. O., Mgbame, M. A., Yekini, S., & Yekini, C. K. (2017). Corporate social responsibility performance and tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Taxation Vol.9 (8)*, 101-108.
- Muzzakki, M. R., & Darsono. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 4, Nomor 3*, 1-8.
- Matangkin, L., Ng, S., & Mardiana, A. (2018). Pengaruh Kemampuan Manajerial Dan Koneksi Politik Terhadap Reaksi Investor Dengan Kecurangan Laporan Keuangan Sebagai Variabel Mediasi. *SIMAK, 16(02)*, 182-209.
- Nugroho, S. A., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Financial Distress, Real Earnings Management dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Journal of Business Administration Vo. 1, No. 2, September*, 17-36.
- Ng, S., & Phie, F. K. (2020). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN POLITICAL CONNECTION TERHADAP TAX AVOIDANCE DAN DAMPAKNYA PADA NILAI PERUSAHAAN. *SIMAK, 18(01)*, 21-46.
- Pohan, C. A. (2018). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis, Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Putri, C. L., & Lautania, M. F. (2016). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia Tahun 2011 - 2014). *Jurnal Ilmia Mahasiswa Ekonomi Ekuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 1*, 101 - 119.
- Rego, S. O., & Wilson, R. (2011). Equity Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting Research*, 775 - 810.
- Ronald, S., Ng, S., & Daromes, F. E. (2019). Corporate Social Responsibility as Economic Mechanism for Creating Firm Value. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 3(1), 22-36.
- Sadjarto, A., Florencia, & Nevanda, O. (2019). Effects of Political Connections and Corporate Governance on Tax Aggressiveness in Indonesian Service and Banking Sectors. *The Asian Institute of Research Journal of Economics and Business Vol.2, No.1, 2019 ISSN 2615-3726*, 190 - 204.
- Sagala, W. M., & Ratmono, D. (2015). Analisis pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak. *Diponegoro Journal of Accounting Volume 4, Nomor 3*, 1-9.
- Tarigan, H. R. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2012 - 2014). *Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Komputer Indonesia*.
- Wicaksono, A. P. (2017). Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 10 (1), April 2017 P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190*, 176 - 180.
- Zaitul, & Ilona, D. (2019). Tax Aggressiveness and Politically Connected Company. *Social Sciences on Sustainable Development for World Challenge: The First Economics, Law, Education and Humanities International Conference, KnE Social Sciences DOI 10.18502/kss.v3i14.4294*, 10 - 19.
- CNBC Indonesia (Januari, 2019) Kinerja Pajak 2018, Lagi-Lagi Tak Capai Target. Diakses Tanggal 1 Agustus 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190103101148-17-48886/kinerja-pajak-2018-lagi-lagi-tak-capai-target>
- CNN Indonesia (November, 2016) Emiten Bursa Efek Indonesia Tunggak Pajak Rp.94,4 Triliun. Diakses Tanggal 14 Oktober 2019.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161123185551-78-174834/emiten-bursa-efek-indonesia-tunggak-pajak-rp944-triliun>

Global Reporting.org (2019) Global Reporting Initiative (GRI), Diakses Tanggal 14 Oktober 2019, <https://isoindonesiacenter.com/sekilas-tentang-iso-26000/>

IDX (2019) Laporan Keuangan Tahunan, Diakses Tanggal 14 Oktober 2019. <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/>

Tempo.co (2019) Prahara Pajak Raja Otomotif, Diakses Tanggal 22 Januari 2020 <https://investigasi.tempo.co/toyota/>

ISO 26000 (2019) ISO 26000 sebagai Standar Global dalam Pelaksanaan CSR, Diakses Tanggal 14 Oktober 2019, <https://isoindonesiacenter.com/sekilas-tentang-iso-26000/>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019) Laporan Keuangan Kemenkeu, Diakses 14 Oktober 2019 <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/anggaran-dan-realisisi-keuangan-kemenkeu/laporan-keuangan-kementerian-keuangan/>

Klikpajak (2019) 5 Ketentuan Anti Tax Avoidance. Diakses Tanggal 12 Desember 2019. <https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/5-ketentuan-anti-tax-avoidance/>

Kompas (2019) 6 Sektor Penyumbang Pajak Terbesar. Diakses Tanggal 12 Desember 2019 <https://money.kompas.com/read/2019/08/03/144800626/6-sektor-penyumbang-pajak-terbesar-ri-siapa-yang-tertinggi-?page=all>

Ortax (2019) Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule Diakses Tanggal 12 Desember 2019. <https://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=36&list=&q=&hlm=6>

Direktur Jenderal Pajak. (2011) Peraturan Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/Pj/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Direktur Jenderal Pajak. (2014) Peraturan Nomor 20/PJ/2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Masa Manfaat yang Sebenarnya Atas Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk keperluan Penyusutan.

Direktur Jenderal Pajak. (2018) Peraturan Nomor 25/PJ/2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2008) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2008) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015) Peraturan Nomor 169/PMK/010/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

Pemerintah Republik Indonesia (2010) Nomor 93 Tahun 2010 Tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Presiden Republik Indonesia (2007) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas